

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Energi merupakan salah satu substansi dasar yang mendasari terjadinya suatu aktivitas dalam kehidupan manusia sehari-harinya, penggunaan energi ini sering disebut dengan istilah konsumsi energi, yang meliputi proses penggunaan energi dalam berbagai sektor baik secara perorangan maupun kelompok, nasional ataupun internasional.

Konsumsi energi dalam skala perorangan dapat ditemukan dalam aktivitas sehari-hari seperti dalam menggunakan lampu untuk penerangan di malam hari, penggunaan BMM untuk kendaraan bermotor. Sedangkan dalam skala kelompok konsumsi energi dapat dilihat dalam sektor industri yaitu dalam proses memproduksi suatu produk dan komersial yaitu dalam penyediaan suatu layanan jasa seperti jasa transportasi.

Hubungan timbal balik dalam penggunaan energi antara individu dan kelompok memicu timbulnya aktivitas ekonomi yaitu suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya (Adam,1776). Dalam aktivitas ekonomi akan terjadi permintaan energi oleh konsumen energi, semakin besar jumlah energi yang dibutuhkan dalam aktivitas ekonomi hal tersebut akan memicu pertumbuhan ekonomi yang terdapat di suatu wilayah atau negara pertumbuhan ekonomi yang baik dapat dilihat dari Gross Domestic Produk (GPD) dari suatu negara yang terus meningkat.

Konsumsi energi yang besar harus disertai dengan kemampuan dalam menyediakan sumber daya energi yang baik agar proses dari konsumsi energi yang terdapat dalam aktivitas ekonomi dapat terus berjalan dengan baik, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara memiliki kewajiban

dan wewenang dalam menyediakan sumber daya energi yang dibutuhkan tersebut, penyediaan sumber daya energi yang digunakan dalam aktivitas ekonomi tersebut meliputi, pengelolaan, pemanfaatan, dan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan energi itu sendiri. manajemen energi tersebut tercantum sebagai kebijakan yang disebut sebagai, kebijakan ketahanan energi atau kebijakan energi.

Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya energi dalam skala besar dan tingkat konsumsi energi yang cukup tinggi tidak langsung menjadikan Indonesia sebagai negara dengan GDP yang tertinggi, hal ini dapat dilihat dari perolehan GDP Indonesia pada tahun 2010 yaitu sebesar 755,1 miliar USD dan menempati posisi ke-16 dunia, akan tetapi Jepang sebagai negara yang tidak memiliki banyak sumber daya energi dapat menempati posisi ke-3 dunia dengan perolehan GDP sebesar 5,7 triliun USD pada tahun yang sama (www.data.worldbank.org).

Salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan yang terjadi antara pendapatan GDP Jepang dan Indonesia, terletak dalam kebijakan energi yang diterapkan. Konsumsi energi Indonesia yang besar tidak disertai dengan kontrol energi yang tidak efisien dan boros, sebagai negara yang memiliki sumber daya yang banyak Indonesia lebih banyak mengimpor sumber daya energi khususnya dalam sektor minyak mentah dari negara lain daripada memanfaatkan sumberdaya energi yang dimilikinya. Pengembangan sumber energi alternatif yang kurang menambah beban yang dimiliki Indonesia dan mengakibatkan ketergantungannya kepada sumber daya energi impor (www.dunia-energi.com).

Jepang merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang besar di Asia, dan menduduki peringkat ke-3 negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Tingkat pertumbuhan ekonomi Jepang yang besar ini menjadikan Jepang sebagai salah-satu negara yang diperhitungkan dalam perekonomian dunia.

Pertumbuhan ekonomi Jepang ini diawali dengan masa keterpurukan paska kekalahan Jepang di Perang dunia ke-2, hancurnya Hiroshima dan Nagasaki oleh bom atom pihak Amerika yang mengakibatkan hilangnya kekuatan perang Jepang dan memaksa Jepang menyerah kepada sekutu (Amerika), pada tanggal 15 agustus 1945.

Berakhirnya perang meninggalkan sebuah keadaan ekonomi yang hancur bagi Jepang. Pabrik-pabrik industri banyak yang tidak bekerja, berjuta-juta orang menganggur ,sebagian karena dibebaskan dari tugas kemiliteran dan sebagian lagi karena kehilangan mata pencaharian akibat perang. Pertanian tidak dapat menghasilkan kecukupan pangan untuk memberi makanan penduduknya, meski ada pembagian jatah yang sangat ketat namun tetap saja ada penyelewengan terhadap pasokan pangan sehingga mengakibatkan banyak penduduk yang kelaparan serta kekacauan yang terjadi diberbagai tempat.

Namun tak lama setelah peristiwa malang itu terjadi, Jepang berhasil bangkit dari keterpurukannya. Kebangkitan Jepang dari kehancuran dahsyat dalam Perang Dunia ke-II bukan karena keajaiban, melainkan diperoleh melalui semangat juang yang tinggi, disiplin yang ketat, dan kerja keras yang dilandasi nilai-nilai (Okta, 2012).

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pesat, menjadikan Jepang sebagai negara yang dapat disejajarkan dengan negara-negara besar seperti Inggris, dan Amerika. Pertumbuhan pendapatan domestik bruto/ PDB Negara Jepang terbilang tinggi yakni sebesar 8% pertahun, terhitung dari tahun 1950 – 1972.

Sejalannya dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat konsumsi Negara Jepang akan energi yang dibutuhkan juga semakin tinggi, kondisi ini berbanding terbalik dengan keadaan Negara Jepang yang merupakan negara dengan sumber energi yang sangat terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan energinya, Negara Jepang melakukan impor sumber daya energi dari luar negeri. Impor sumber daya energi ini dimulai sejak tahun 1950 dan bersamaan dengan hal

tersebut pertumbuhan ekonomi yang pesat mulai terjadi, impor sumber daya energi khususnya pada sektor minyak bumi meningkat pesat di Jepang, peningkatan konsumsi energi Jepang masih terus berlanjut, hingga berakibat pada naiknya rasio penggunaan minyak bumi dari antara keseluruhan energi mencapai 77% di tahun 1973 (www.Batan.go.id).

Konsumsi energi yang besar dan terus meningkat ini mencapai puncaknya, pada tahun 1973 yakin sebesar 6% dari keseluruhan konsumsis energi di dunia hal ini berbanding terbalik dengan populasi penduduk Jepang hanya mengisi 3% dari jumlah penduduk dunia. Konsumsi energi yang sangat besar ini membuktikan bahwa Jepang bangkit sebagai Negara yang sangat tinggi intensitas penggunaan energinya di dunia (www.Batan.go.id).

Pada tahun yang sama terjadi krisis minyak pertama (1973), yang merupakan dampak akibat konflik Arab-Israel. Konflik yang berujung perang yang terjadi antara negara-negara Arab khususnya Mesir dan Suriah dengan Israel membuat harga minyak dunia tidak stabil, kondisi ini menyeret perekonomian dunia pada saat itu dilanda kekhawatiran akan sulitnya untuk mendapatkan minyak murah.

Negara-Negara maju yang mengalami pertumbuhan ekonomi karena bergantung kepada minyak murah, menyadari rapuhnya struktur pasokan energi mereka. tidak terkecuali Jepang hal ini menyebabkan munculnya tingkat inflasi sebesar 23% di negara tersebut. Harga-harga yang terus melonjak, hilangnya sumber energi murah memaksa Jepang untuk membuat sebuah kebijakan dalam mempertahankan pasokan energinya, hal ini menyebabkan munculnya gagasan ide untuk membentuk kebijakan ketahanan energi (www.Batan.go.id).

Setelah kondisi krisis minyak yang terjadi pada tahun 1973, berdampak sangat buruk bagi ekonomi nasional Jepang, ketahanan energi menjadi poin penting dalam perumusan kebijakan keamanan Jepang. semenjak terjadinya krisis minyak tersebut seruan untuk menggunakan sumber daya energi diluar minyak bumi mulai dikeluarkan dan dikaji oleh *Ministry of International Trade and Industry* (MITI),

hingga kemudian pada tahun 1978, MITI mengeluarkan kebijakan untuk pentingnya menekankan meningkatkan konsumsi batu bara, gas alam, tenaga nuklir dan sumber energi terbarukan termasuk solar, teknologi gelombang biomass dan angin sebagai dari upaya penanggulangan penggunaan minyak bumi (Chapman,1982).

Penekanan untuk meningkatkan konsumsi sumber daya energi pengganti minyak terbilang berhasil hal ini dibuktikan dengan menurunnya jumlah konsumsi minyak dari 82 persen pada tahun 1972 menjadi 72 persen di tahun 1980. Seiring dengan menurunnya konsumsinya minyak bumi tersebut inflasi yang sempat melanda Jepang mulai turun ke angka 13 persen di tahun 1975. Total konsumsi energi nasional Jepang, dari sektor minyak tidak lebih dari 50 persen dan krisis minyak kedua yang terjadi pada tahun 1979 berhasil diatasi oleh pemerintah Jepang dengan menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut (Chapman,1982).

Selain itu pula dampak dari kebijakan ketahanan energi ini berdampak pada naiknya tingkat pertumbuhan *Gross domestic product* (GDP) Negara Jepang yang terus meningkat pesat setiap tahunnya, yakni pada tahun 1976 pertumbuhan GDP Jepang naik menjadi 583,1 milyarUSD dari sebelumnya pada tahun 1973 429,9 milyar USD atau sekitar 3.5% kenaikan GDP yang terjadi. (Suryohadiprodjo, 1987).

Seiring dengan upaya untuk mengurangi konsumsi Sumber daya energi, minyak bumi, pengembangan energi pengganti minyak bumi semakin diperkuat. Sumber daya energi seperti nuklir, gas alam dan batu bara menjadi energi utama pengganti minyak bumi. Energi nuklir dan gas alam digunakan untuk menggantikan minyak bumi terutama untuk pembangkitan listrik. Selain untuk pembangkitan listrik, pemanfaatan batu bara sebagai bahan bakar untuk industri bahan dasar, seperti pulp kertas dan semen, mengalami peningkatan. Dengan cara seperti ini jumlah konsumsi minyak bumi secara absolut semakin mengalami

penurunan, persentasenya dari antara energi primer menjadi lebih rendah dari 60% pada pertengahan tahun 1980 (www.Batan.go.id).

Di tahun 1980 Jepang merumuskan ketahanan energinya yang dicatat dalam dalam laporan “*Japan’s Comprehensive National Security*” yang mencangkup dua poin mengenai ketahanan energinya dalam laporan tersebut: “(a) memastikan cukupnya pasokan energi Jepang dalam jangka panjang, baik dalam menyikapi kemungkinan timbulnya permintaan tinggi energi dunia, baik dari negara-negara industri maju ataupun yang baru mengalami industrialisasi; (b) melakukan perubahan metode dalam pemasokan energi dengan terus mengembangkan sumber-sumber energi lain seperti gas, batu bara, dan tenaga nuklir (Chapman,1982).

Ketersediaan energi yang stabil didukung dengan kemampuan sumber daya manusia yang tinggi serta kerjasama antara negara-negara G7 (Group of Seven) mengantarkan Jepang pada era keemasan dimana tingkat pertumbuhan ekonomi dapat mengejar tingkat pertumbuhan Amerika Serikat, pada masa ini nilai yen telah menjadi begitu kuat hingga melewati 200 yen per dolar AS. Nilai yen menguat hingga 128 yen per dolar AS pada awal tahun 1988. Pertumbuhan ekonomi yang begitu kuat terus berlangsung GDP Jepang terus menguat hingga mencapai 5.449 miliar USD di tahun 1995, akan tetapi pertumbuhan ekonomi ini malah menjadi bumerang bagi Jepang di kemudian hari, harga aset-aset Jepang yang begitu mahal akibat krus antara yen dan dollar sangat kecil menyebabkan kekosongan pembelian yang membuat GDP Jepang jatuh bebas di tahun 1998 GDP Jepang jatuh ke angka 4.939 USD (Chapman,1982).

Pada awal abad ke-21 dunia mulai mengalami perubahan-perubahan drastis, mulai dari pengembang sumber energi alternatif, pemanasan global, dan lain-lain. Perubahan yang terjadi ini mengakibatkan banyak negara mulai bergerak untuk merumuskan kebijakan baru guna menghindari krisis yang terjadi pada tahun 1973 dan 1979 .

Sementara itu Jepang walaupun keadaan ekonomi yang jatuh bebas, negara ini terus mengembangkan energi nuklirnya berkembang ini hingga pada tahun 2004, Jepang memiliki 53 reaktor tenaga nuklir, menjadikan Jepang sebagai negara dengan jumlah reaktor nuklir terbanyak ketiga setelah AS (103) dan Prancis (57). Penggunaan tenaga nuklir memiliki potensi yang sangat besar. Hal tersebut memungkinkan Jepang untuk memproduksi lebih banyak bahan bakar daripada jumlah konsumsi mereka. Artinya Jepang akan mampu mereduksi dengan sangat signifikan ketergantungan mereka dari pasokan luar negeri. Hal ini mengantarkan Energi Nuklir sebagai dan sumber energi utama dan sebagai poin tambahan dalam kebijakan ketahanan energi baru pada tahun 2005 . yaitu tentang pemaksimalan energi nuklir dalam memenuhi kebutuhan energi di Jepang, selain itu Kebijakan ketahanan energi yang dikeluarkan pada tahun 1980 tidak bertahan selamanya dikarenakan kondisi dunia yang berubah kebijakan yang sama tidak untuk kondisi yang baru hal ini mendorong Jepang untuk mengembangkan kebijakan ketahanan energi baru (<http://www.batam.go.id>) .

Hal ini kemudian dicantumkan dalam laporan Agency for Natural Resource and Energy (ANRE) dengan mengidentifikasi lima prinsip dalam menjaga ketahanan energi: Pertama, Jepang perlu meningkatkan stabilitas suplai energi, memastikan cadangan minyak dalam negeri dan mengembangkan ladang minyak sendiri. Kedua, perlu melaksanakan program perlindungan energi. Ketiga, Jepang perlu mengembangkan sumber energi alternatif yang lain. Keempat, demi mendukung pencegahan global warming, perlu penggunaan lebih banyak tenaga nuklir dan energi terbarukan (tanpa CO₂) dan gas alam (yang memiliki sedikit kandungan CO₂). Kelima, Jepang perlu mendorong reformasi sektor energi dalam merespon globalisasi, memastikan semua pemain ada dalam mekanisme pasar serta aturan yang berlaku.

Kebijakan energi baru Jepang ini menyebabkan terjadinya penurunan GDP dan ketidak stabilan GDP yaitu pada tahun 2005-2006 dan didorong dengan

munculnya isu energi dunia internasional yang semakin kompleks, membuat Jepang perlu mengambil langkah serius. yaitu Jepang menghadapi tantangan dari kompetitor-kompetitor baru seperti China dan India, juga kompleksitas persoalan politik dan keamanan global seperti terorisme, pembajakan, yang bisa jadi akan sangat mengganggu stabilitas pasokan energi Jepang. Isu terorisme, misalnya, dipandang oleh pemerintah Jepang sebagai salah satu ancaman paling serius terkait keamanan pasokan energi. Dalam laporan yang diberi judul “Interim Security Report” yang dikeluarkan Japan’s Energy Security Group bulan Juni 2006, disebutkan bahwa terorisme menjadi salah satu ancaman paling serius yang dihadapi Jepang, terutama di jalur-jalur laut yang sering dilalui kapal-kapal pengangkut minyak dari Timur Tengah ke Jepang.

Di tahun 2006 Jepang merumuskan kebijakan ketahanan energi yang baru, dan cukup berbeda dari kebijakan tahun 2005 sebelumnya, terutama pada poin terakhir, yaitu poin Kelima, Jepang perlu mendorong reformasi sektor energi dalam merespon globalisasi, memastikan semua pemain ada dalam mekanisme pasar serta aturan yang berlaku. Strategi terbaru Jepang yang dikeluarkan Ministry of Economy Trade and Industry (METI) di bulan Mei dengan judul “New National Energy Strategy”, merupakan upaya pemerintah dalam membangun kebijakan ketahanan energi yang kuat dan menyeluruh, yang menekankan pada peran pemerintah dalam memastikan pasokan energi, dengan mendorong perubahan dari mekanisme keterbukaan pasar ke upaya intervensi pemerintah yang lebih besar.

Rumusan kebijakan ketahanan energi Jepang yang baru ini juga menggambarkan upaya peningkatan keamanan dengan memadukan tujuan dari kebijakan energi dan kebutuhan akan penekanan kemandirian melalui kebijakan efisiensi ekonomi. Kebijakan ketahanan energi yang baru ini terbilang cukup berhasil hal ini dikarenakan meningkatnya GDP Jepang secara signifikan dari tahun 2008-2010.

Dari uraian diatas Pengaruh kebijakan energi yang diambil oleh Negara Jepang dapat menjadi penentu pendapatan GDP yang dihasilkan oleh suatu Negara menjadi topik yang menarik untuk dikaji, dan membuat penulis tertarik, untuk meneliti lebih lanjut tentang perubahan kebijakan ketahanan energi Jepang yang mempengaruhi pendapatan Negara perkapita Jepang.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Awal pemerintah Jepang dalam bidang ketahanan energi.
2. Faktor-Faktor penyebab Jepang mengubah kebijakannya dalam ketahanan energi.
3. Dampak dari perubahan kebijakan ketahanan energi Jepang terhadap pertumbuhan ekonomi Jepang.
4. Pertumbuhan Gross Domestic Product Jepang

1.3 Batasan Masalah

Dalam penulisan karya ilmiah penulis membatasi hanya pada, Dampak perubahan kebijakan ketahanan energi Gross Domestic Product (GDP) Jepang pada tahun 1980-2010.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan ketahanan energi Jepang diterapkan?
2. Mengapa Jepang mengubah kebijakan ketahanan energinya ?
3. Seperti apa dampak yang ditimbulkan dari perubahan kebijakan ketahanan energinya ?

1.6 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan kebijakan ketahanan energi yang diterapkan oleh Jepang.
2. Untuk mengetahui penyebab Jepang mengubah kebijakan ketahanan energinya.
3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari perubahan kebijakan ketahanan energi terhadap pendapatan Negara Jepang perkapita.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dalam sejarah Jepang umumnya dan sejarah masyarakat Jepang khususnya, dan dapat menjadi referensi dalam memahami salah satu bentuk Pola konsumsi dan struktur manajemen energy yang terdapat pada masyarakat Jepang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya di masa mendatang. Selain itu, diharapkan juga dapat membantu pembelajar sejarah Jepang dalam mengetahui serta memahami tentang kebijakan-kebijakan yang pernah diterapkan oleh pemerintah Jepang dalam manajemen energinya.

1.7 Landasan Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Adam Smith dalam bukunya “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” (1776). berkembangnya ekonomi suatu negara, adalah adanya pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk maka akan terdapat pertambahan output atau hasil, hal ini akan membuat kebijakan Laissez-faire atau sistem mekanisme pasar akan memaksimalkan tingkat pembangunan ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat.

Sementara itu pertumbuhan ekonomi menurut Kuznet (Jhingan 2000), adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang - barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang di perlukannya.

★ Boediono (1999) menyebutkan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Pengertian tersebut mencakup, tiga aspek, yaitu proses, output perkapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses, bukan gambaran ekonomi atau hasil pada saat itu GDP (Gross Domestic Product).

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut penulis menyimpulkan, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang yang dimiliki suatu negara yang mencakup tiga aspek, yaitu proses, output perkapita, dan jangka panjang.

2. Gross National Product (GDP)

Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Selain itu, GDP juga mengukur dua hal pada saat bersamaan : total pendapatan semua orang dalam perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian. Alasan GDP dapat melakukan pengukuran total pendapatan dan pengeluaran dikarenakan untuk suatu perekonomian secara keseluruhan, pendapatan pasti sama dengan pengeluaran. Pengertian dari GDP adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (final) yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode.

Namun, dalam GDP terdapat beberapa hal yang tidak disertakan seperti nilai dari semua kegiatan yang terjadi di luar pasar, kualitas lingkungan dan distribusi pendapatan. Oleh sebab itu, GDP per kapita yang merupakan besarnya GDP apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu negara merupakan alat yang lebih baik yang dapat memberitahukan kita apa yang terjadi pada rata – rata penduduk, standar hidup dari warga negaranya (Mankiw,2006:5,6,22,23).

3. Ketahanan Energi

Menurut Dewan Energi Nasional/DEN (sebagaimana dikutip dalam Ketahanan Energi Indonesia, 2015), “ketahanan energi adalah suatu kondisi yang meliputi terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup” .

Ada 4 aspek yang menunjukkan kondisi ketahanan energi:

1. Ketersediaan, yaitu kemampuan untuk memberikan jaminan pasokan energi (security of energy supply)
2. Aksesibilitas, yaitu kemampuan untuk mendapatkan akses terhadap energi (infrastructure availability)
3. Daya beli, kemampuan untuk menjangkau harga (keekonomian) energi
4. Lingkungan Hidup

Secara umum terdapat lima hal yang menjadi indikator eksistensi ketahanan energi : 1) Availability, yaitu ketersediaan energi dalam jumlah yang memadai untuk keberlangsungan kegiatan perekonomian, baik didapatkan dari sumberdaya lokal, maupun mengimpor dari negara lain. 2) Accessibility, aspek keterjangkauan energi bagi masyarakat yang membutuhkan dari sisi spasial. 3) Affordability: Aspek keterjangkauan energi bagi konsumen dari sisi tingkat keekonomian dan daya beli masyarakat. 4) Acceptability, penerimaan seluruh elemen bangsa terhadap pengusahaan dan pemanfaatan jenis sumberdaya energi tertentu, terutama terkait dengan aspek sosial dan 5) Sustainability, ketersediaan energi secara terus menerus (<http://www.ketahananenergi.com>).

1.8 Metode Penelitian

Bentuk penelitian menggunakan untuk penelitian ini kepustakaan, peneliti mengamati obyek penelitian menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data yang bersumber dari studi dokumen yang meliputi baik dari dokumen primer maupun dokumen sekunder. Dokumen primer didapatkan dari laporan-laporan resmi pemerintah atau institusi-institusi resmi terkait. Sedangkan dokumen sekunder didapatkan dari buku, jurnal, atau hasil penelitian dari sumber yang valid, yang berhubungan dengan topik penelitian.

1.9 Sistematika Penulisan

Bab I Menjelaskan Latar Belakang Masalah Kerangka Teori, Rumusan Masalah, ,identifikasi masalah, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Menjelaskan pengertian mengenai energi, penggunaan energi di Jepang. Serta dinamika energi di Jepang, menjelaskan sejarah timbulnya ketahanan energi di dunia dan munculnya ketahanan energi Negara Jepang.

Bab III Penyebab perubahan-perubahan kebijakan serta dampak yang ditimbulkan dari perubahan kebijakan ketahanan energi pemerintah Jepang terhadap pendapatan Negara perkapita Jepang pada tahun 1980-2001.

Bab IV Kesimpulan

